



BLT TAHAP II RP 400 RIBU

Pemkot: Tindaklanjuti RTS Pengganti

YOGYA (KR) - Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 beberapa waktu lalu di Kota Yogyakarta berjalan cukup kondusif. Hal ini dilihat dari minimnya gejala yang muncul di masyarakat. Walaupun begitu pelaksanaan program BLT tahap I masih menyisakan beberapa permasalahan terkait dengan tahapan penggantian Rumah Tangga Sasaran (RTS) belum mencapai 100 persen. Sementara program BLT tahap II direncanakan akan cair bulan September dengan nominal mengalami peningkatan Rp 400 ribu untuk 4 bulan, yakni September-Desember.

Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam Sosialisasi (Evaluasi) Program BLT dan Persiapan Pendaftaran Perlindungan Sosial 2009, di Hotel Ruba Graha, Sabtu (23/8). Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Drs Rapingun ini diselenggarakan oleh Badan Informasi Daerah (BID) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan BID DIY dan Depkominfo RI, diikuti 75 orang dari unsur camat, lurah, serta instansi terkait.

Narasumber yang hadir, Arina (Kepala BPS Kota Yogyakarta), Tri Hastono (Dinkesos Kota Yogyakarta), Drs Sulistiyo SH CN MSi (Dinsos DIY) dan M Rosyad (PT Pos Indonesia). Kepala BID Kota Yogyakarta Drs Sukirno MM mengatakan, acara ini bertujuan antara lain untuk membangun kesamaan pemahaman dan upaya mempercepat proses penggantian RTS. "PT Pos Indonesia harus segera menindaklanjuti pencetakan RTS pengganti sesuai dengan usulan rebug kelurahan," katanya.

M Rosyad mengungkapkan sampai saat ini usulan penerima RTS pengganti masih terus bergulir. Jumlah kupon untuk RTS pengganti mencapai 1.129 kupon. Menurut rencana kupon akan didatangkan pada awal September. Dengan asumsi pendistribusian kupon selama seminggu pencairan BLT tahap II direncanakan mulai 9 September. "Sebenarnya belum adanya RTS pengganti tidak masalah dan tidak mengganggu pencairan BLT tahap II. Harapannya, kalau memang mundur tidak terlalu lama," ungkapnya.

Sementara itu, pelaksanaan pendaftaran Program Perlindungan Sosial akan dilakukan oleh BPS pada bulan September 2008. Kepala BPS Kota Yogyakarta, Arina mengungkapkan tujuan pendaftaran tersebut untuk memperbaiki database RTS dengan membuang rumah tangga (RT) yang sudah meninggal dunia, RT penerima BLT 2008 yang sudah tidak layak dan memasukkan RTS baru.

Selain itu, menurut Arina, untuk memperbaiki keterangan tentang kehidupan sosial ekonomi RTS dan menambah data anggota RTS. Untuk mengantisipasi timbulnya persoalan pendaftaran ini harus dipersiapkan secara matang karena menyangkut hal-hal sensitif.

Dalam sosialisasi itu, juga direkomendasikan perlunya koordinasi intensif antara BPS dengan camat dan lurah. BPS juga diminta lebih proaktif mengemas koordinasi tersebut secara optimal. Sedangkan pelaksanaan pendaftaran program perlindungan sosial oleh BPS perlu menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) sebagai salah satu basis data atau minimal digunakan sebagai acuan data sasaran yang harus disisir. Penggunaan data KMS ini sekaligus untuk melakukan komparasi validitas data.

Hasil dari pendataan juga tidak perlu dipertanyakan karena data KMS adalah untuk basis program APBD dan parameter yang digunakan tidak sama. Camat dan lurah sebagai pihak yang langsung bersinggungan dengan masyarakat juga diminta untuk aktif mencermati desain pendataan dan memberikan masukan sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyisakan ganjalan dan masalah. (R-3)-f

<ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota Yogyakarta 2. Wakil Walikota Yogyakarta 3. Sekretaris Daerah 4. Asisten 	<p>INSTANSI</p> <p>1. Dinkesos</p>	<p>NILAI BERITA</p>	<p>TINDAK LANJUT</p>
--	------------------------------------	---------------------	----------------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 30 Juni 2006
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005